BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengubah peta politik yang merupakan kewenangan dan tugas pemerintahan. Era sentralisasi telah berakhir, digantikan oleh otonomi daerah. Pada masa Orde Baru setiap kegiatan pemerintah daerah merasakan pemusatan kekuasaan, bahkan rencana pembangunan masing masing daerah lebih mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerahnya. Untuk mengembangkan potensi daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira, 2013).

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan termasuk pembangunan masyarakat bangsa, dan negara secara menyeluruh. Pembangunan nasional diselenggarakan oleh rakyat yang terencana menyeluruh, terarah, berkesinambungan, dan mendorong berkembangnya kemampuan nasional, dalam rangka menciptakan kehidupan yang setara dengan negara lain. Sebagaimana kita ketahui bersama untuk mewujudkan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan harus berkeadilan dan merata di seluruh pelosok tanah air, hal ini tidak terlepas dari peran pembangunan daerah sebagai pembangunan keberhasilan pembangunan daerah dan menjadikan pembangunan daerah sebagai pembangunan yang benar-benar menyeluruh. Pembangunan dengan negara dapat diwujudkan secara tepat dan disesuaikan dengan potensi daerah

Otonomi daerah adalah rencana pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mempersempit kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kewajiban. Mengenai kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saputro & Arifin, 2016)

Belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal, yang digunakan untuk menambah aktiva tetap, persediaan yang memberikan pendapatan lebih dari satu periode akuntansi, termasuk biaya pemeliharaan dan kualitas aktiva yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan umur pakai dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Hermawan *et al*., 2016)

APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan, pedoman bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan kepada publik, dalam hitungan stau tahun anggaran. APBD mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah Saputro & Arifin, (2016) Namun, belum semua dana tersebut terealisasi dengan baik dan benar. Hal ini terlihat dari banyaknya infrastuktur yang belum memenuhi standar, atau dapat dikatakan belum mencapai tingkat pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masalah sebenarnya, masih banyak jalan berlubang di sana-sini, dan pengguna jalan akan merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, dan masih banyak masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah (Hermawan *et al*., 2016)

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan cara peningkatan penanaman modal dalam bentuk aset tetap yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari belanja modal adalah peningkatan aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik (Saputro & Arifin, 2016)

Tabel 1.1 Belanja Modal Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2018	1.090.380.000.000	1.081.810.000.000	-8.570.000.000	99%
2019	1.363.420.000.000	969.490.000.000	-393.930.000.000	71%
2020	1.711.020.000.000	1.195.020.000.000	-516.000.000.000	69%

Sumber : https://djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Belanja modal daerah di Provinsi sulawesi selatan pada tahun 2018 memiliki anggaran sebesar 1.090.380.000.000 dengan realisasi sekitar 1.081.810.000.000, tahun 2019 memiliki anggaran sebesar 1.363.420.000.000 dengan realisasi sekitar 969.490.000.000, tahun 2020 memiliki anggaran sebesar 1.711.020.000.000 dengan realisasi sekitar 1.195.020.000.000

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak *et al*., (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal namun menurut hasil penelitian yang dilakukan Wandira, (2013) menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al*., (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah Se-Malang Raya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryana, (2015) hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah.

Penelitian yang dilakukan Romualda *et al*., (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal daerah, namun menurut Roihatul Jannah, Budi Wahono, (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh yang signifikan negatif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan K. R. Dewi et al., (2015) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah, namun menurut penelitian yang dilakukan Alhogbi, (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat serta meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, mengoptimalkan potensi lokal dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah

2. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan refernsi dan memberikan tambahan pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana yang tepat untuk menerapkan teori yang telah didapat pada kegiatan perkuliahan dan menambah wawasan penulis mengenai bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai Pemerintah Daerah

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

1.5 Batasan Masalah

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, perumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang menguraikan toeri-teori yang relevan dengan penelitian, telah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian, analisis data, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya